**LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

**TAHUN ANGGARAN 2018**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASANPERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BAB I. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

1. **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Pada tahun 2018 Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat memiliki 9 (sembilan) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
9. Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi
10. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
13. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD
14. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
15. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**
17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
18. **Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur**
19. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
20. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
21. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
22. Penatausahaan Keuangan SKPD
23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
24. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
25. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
26. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur TPA Regional
27. **Program Pengembangan Perumahan**
28. Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat
29. Sosialisasi Percepatan Penyediaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
30. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan
31. Sosialisasi Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam
32. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyatdan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
33. Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat
34. Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat
35. **Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan**
36. Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Kumuh, Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
37. Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi
38. Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal)
39. Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus
40. Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat
41. Sosialisasi Persampahan Terhadap Kab/Kota
42. **Program Pengelolaan Pertanahan**
43. Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah
44. Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
45. Bimtek Pengelolaan Pertanahan
46. Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan
47. Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
48. Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat
49. Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi
50. **REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Total Anggaran yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2018 sebesar Rp. 11.614.680.414,00 dan realisasi keuangan Rp. 8.944.862.591,50 atau (77,01%) dan realisasi fisik 100%. Realisasi program dan kegiatan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 976.264,785,00 dan realisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 738.550.298,00 atau sebesar 75,65% dengan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 2.598.900,00 atau 86,63% dengan realisasi fisik 100%, berupa surat menyurat ke instansi/lembaga terkait selama 12 bulan dengan hasil berupa terpenuhinya pelaksanaan dan pengiriman jasa surat menyurat sebesar 100%.
3. Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 183.630.846,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 163.724.882,00 atau 89,16% dengan realisasi fisik 100%, pelayanan jasa sopir kantor selama 12 bulan dengan outcome terpenuhinya kebutuhan transportasi di dinas.
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 66.233.450,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 65.314.570,00 atau 98,61% dengan realisasi fisik 100% berupa ATK dalam rangka pelayanan administrasi kantor selama 12 bulan, dengan hasil (outcome) berupa terpebuhinya peningkatan pelayanan administrasi melalui ketersediaan ATK yang cukup dan memadai.
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.999.850,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 21.762.120,00 atau 75,04% dengan realisasi fisik 100% berupa barang cetakan atau penggandaan administrasi kantor selama 12 bulan dengan hasil (outcome) berupa ketersediaan barang cetakan dan pengandaaan yang cukup dan memadai sebesar 100%.
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 4.066.700,00 atau 45,19% dengan realisasi fisik 100%, berupa komponen instalasi listrik selama 12 bulan. Dengan hasil (outcome) berupa lancarnya penerangan kantor selama 12 bulan.
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.291.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 6.130.000,00 atau 65,98% dengan realisasi fisik 100% berupa surat kabar lokal dan nasional. Dengan outcome berupa meningkatnya sumberdaya aparatur melalui ketersediaan bahan bacaan yang memadai sebesar 100%.
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 638.109.639,00 terealisasi sampai desember 20018 sebesar Rp. 445.040.126,00 atau 69,74% dengan realisasi fisik 100% berupa biaya perjalanan dinas dalam dan luar daerah. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kinerja aparatur melalui koordinasi dan konsultasi lintas sektor keluar dan dalam daerah dengan realisasi 100%.
9. Penyediaan jasa informasi, dokumentasi dan publikasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 29.913.000,00 atau 78,72% dengan realisasi fisik 100% berupa publikasi. Dengan hasil (outcome) meningkatnya motivasi kerja aparatur melalui ketersediaan jasa dokumentasi dan informasi dengan realisasi 100%
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.541.484.078,00 terealisai sampai desember 2018 sebesar Rp. 1.370.241.040,00 atau 88,89% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 156.300.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 128.278.920,00 atau 82,07% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan 6 unit kendaraan roda 4. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kelancaran tugas operasional kantor dengan kendaraan yang layak pakai dengan realisasi 100%.
12. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan jaringan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.800.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 5.200.000,00 atau 76,47% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pemeliharaan selama 1 tahun dengan hasil terpeliharanya komputer dengan baik dan lancar dalam penggunaan.
13. Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian aset OPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.640.202,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 56.489.620,00 atau 67,54% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terciptanya pengelolaan, pengawasan dan pengendalian barang OPD dengan baik dan tertata.
14. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 647.160.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 549.821.500,00 atau 84,96% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersedianya kendaraan dinas operasional dengan hasil terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional penunjang aktivitas perkantoran dengan realisasi sebesar 100%.
15. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 647.583.876,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 630.451.000,00 atau 97,35% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa peralatan dan perlengkapan kantor dengan hasil terlaksananya pekerjaan dengan baik dengan realisasi sebesar 100%.
16. Program peningkatan Disiplin Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.315.200,00 dengan realisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 60.016.000,00 atau 75,67% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
17. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.315.200,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 60.016.000,00 atau 75,67% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya. Dengan hasil (outcome) berjalannya disiplin aparatur sipil negara pada organisasi perangkat daerah.
18. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.960.000,00 dengan realisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 104.338.475,00 atau 71,98% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
19. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 144.960.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 104.338.475,00 atau 71,98% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa aparatur mengikuti bimtek perundang-undangan. Dengan hasil (outcome) brupa meningkatnya pengetahuan sumberdaya aparatur untuk mendukung tupoksi.
20. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 455.723.300,00 teralisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 366.637.640,00 atau 80,45% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
21. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.179.950,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 73.193.670,00 atau 77,72% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan perencanaan RKA dan DPA SKPD. Dengan hasil (outcome) terciptanya perencanaan dan penganggaran dinas dengan realisasi 100%
22. Penatausahaan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 218.274.550,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 189.750.000,00 atau 86,93% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan bendaharan pengeluaran, laporan keuangan dll. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas laporan keuangan SKPD dengan realisasi 100%
23. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 24.658.670,00 atau 49,32% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa laporan kinerja, perjanjian kinerja, renja, LPPD, LKPJ, laporan tahunan. Dengan hasil (outcome) meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan untuk dijadikan pedoman dalam perencanaan dan realisasi 100%.
24. Monitoring dan Evaluasi Program dan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 93.268.800,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 79.035.300,00 atau 84,74% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya monitoring dan evaluasi kinerja dan pelaporan program tahunan OPD secara terpadu. Dengan hasil (outcome) tercapainya target pelaksanaan program yang berkualitas.
25. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan alokasi anggaran Rp. 1.254.423.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp 1.249.772.000,00 atau 99,63% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
26. Peningkatan pembangunan infrastruktur TPA Regional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.254.423.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 1.249.772.000,00 atau 99,63% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersedianya infrastruktur di TPA Sampah regional. Dengan hasil berupa infrastruktur pelengkap operasional TPA Sampah Regional.
27. Program Pengembangan Perumahan dengan alokasi anggaran Rp. 1.623.188.392,00 teralisasi sampai desember 2017 sebesar Rp. 1.517.611.590,00 atau 93,50% dan realisasi fisik sebesar 100% dengan kegiatan sebagai berikut :
28. Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 343.588.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 317.437.034,00 atau 92,39% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan rapat koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat serta terlaksananya pendampingan Bidang Teknis PPSP dan AMPL. Dengan hasil Meningkatnya Kapasitas SDM dalam Kelembagaan Pokja untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman serta Meningkatnya Pelayanan PPSP dan AMPL di Kabupaten/Kota.
29. Sosialisasi Perencanaan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 60.293.700,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 58.839.500,00 atau 97,59% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Sosialisasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dengan hasil Meningkatnya Peran Pengembang dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kab/Kota.
30. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 64.971.700,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 52.127.800,00 atau 80,23% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Kepada Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan hasil meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Rakyat.
31. Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah Yang Aman Terhadap Bencana Alam dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 165.497.992,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 130.242.000,00 atau 78,70% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman terhadap Bencana Alam kepada Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan. Dengan hasil Meningkatnya Pemahaman Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan terhadap Rumah yang Aman Bencana Alam.
32. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 199.540.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 181.942.328,00 atau 91,18% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota. Dengan hasil terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota.
33. Penyusunan SPM Bidang perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 148.435.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 142.179.000,00 atau 95,79% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa tersusunnya standar pelayanan minimal bidang perumahan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terlaksananya penyusunan standar pelayanan minimal bidang perumahan di Provinsi Sumatera Barat.
34. Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 640.862.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 634.843.928,00 atau 99,06% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa terlaksananya Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terupdatenya data rumah tidak layak huni di Provinsi Sumatera Barat.
35. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
36. PerencanaanPenangananLingkunganPerumahan dan Kumuh, Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 568.462.030,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 555.748.059,00 atau 97,76% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Dengan hasil Tersedianya Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh pada Kawasan Sasaran.
37. Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.817.697.594,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 1.484.089.759,00 atau 81,65% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK). Dengan hasil terwujudnya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK)
38. Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, DesaTertinggal) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.457.015.505,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 83.643.100,00 atau 5,74% dan realisasi fisik sebesar 100% berupa Terlaksananya Pembangunan Kawasan Strategis dan Khusus. Dengan hasil tersedianya PSU di Kawasan Strategis dan khusus. Pembangunan PSU di Kawasan Linggai Kabupaten Agam realisasi anggaran tidak dilakukan karena adanya pekerjaan pada saat akhir tahun anggaran belum selesai dan kegiatan pada anggaran perubahan yang tidak dilaksanakan terdiri dari : 1). Pembangunan Kawasan pariwisata Linggai Kabupaten Agam, 2). Oengawasan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam. 3). Lanjutan Pembangunan Kawasan Pariwisata Linggai Kabupaten Agam.
39. PerencanaanPrasaranaSaranaUtilitasUmum Kawasan Strategis dan Khusus dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 480.038.430,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp 478.451.818,00 atau 99,67% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya perencanaan prasarana sarana umum (PSU) kawasan strategis dan khusus. Dengan hasil tersedianya perencanaan penanganan kawasan kumuh pada kawasan sasaran.
40. PenyusunanRanperdaPersampahanProvinsi Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 131.063.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 108.248.504,00 atau 82,59% dan realisasi fisik 100% berupa Dokumen Draft Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan. Dengan hasil berupa Draft Ranperda Sumatera Barat.
41. SosialisasiPersampahanTerhadapKab/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 102.045.100,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 64.248.700,00 atau 62,96% dan realisasi fisik 100% berupa jumlah kabupaten/kota yang telah diberikan sosialisasi persampahan. Dengan hasil terlaksananya sosialisasi di daerah.
42. Program Pengelolaan Pertanahan
43. Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 62.612.800,00 atau 75,44% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah. Dengan hasil meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah dalam Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah.
44. Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 79.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 73.272.513,00 atau 92,75% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat. Dengan hasil meningkatnya PemahamanAparatur Pemerintah dalam Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat.
45. Bimtek Pengelolaan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 103.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 50.441.300,00 atau 48,97% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pertanahan. Dengan hasil meningkatnya kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dalam pengelolaaln pertanahan.
46. Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 235.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 152.284.600,00 atau 64,80% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan penanganan masalah pengelolaan pertanahan. Dengan hasil meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah dalam pelasanaan inventarisasi dan penanganan masalah pengelolaan pertanahan.
47. Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 269.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 256.517.465,00 atau 95,36% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya pembinaan dan monitoring pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan hasil meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
48. Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 sebesar Rp. 109.363.254,00 atau 77,56% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan hasil terwujudnya penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Provinsi Sumatera Barat.
49. Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.000.000,00 terealisasi sampai desember 2018 Rp. 58.773.676,00 atau 80,51% dan realisasi fisik 100% berupa terlaksananya sosialisasi dan monitoring pemberian izin lokasi. Dengan hasil meningkatnya pemahaman aparatur pemerintah dalam pemberian izin lokasi.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Program** | **Kegiatan** | **Keluaran** | **Hasil** | **Pagu Anggaran** | **Realisasi Anggaran** | **Realisasi Fisik** | **Realisasi Keuangan** |
| **1.** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Tersedianya Pelayanan Jasa Surat Menyurat | Terpenuhinya Kebutuhan Pengirim Surat Menyurat dan Kebutuhan Materai | 3.000.000 | 2.598.900 | 100 | 86,63 |
|  |  | Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor | Tersedianya Sopir Kantor | Terpenuhinya Kebutuhan Transportasi di Dinas Perumahan  Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 183.630.846 | 163.724.882 | 100 | 89,16 |
|  |  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor | Terciptanya Kelancaran Administrasi | 66.233.450 | 65.314.570 | 100 | 98,61 |
|  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya kebutuhan akan barang cetakan dan  penggandaan/foto copy yang diperlukan | Terciptanya Administrasi yang Baik dan Tertata | 28.999.850 | 21.762.120 | 100 | 75,04 |
|  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya alat-alat listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terciptanya Kenyamanan dalam Pelaksanaan Pekerjaan | 9.000.000 | 4.066.700 | 100 | 45,19 |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan | Terpenuhinya Kebutuhan Informasi | 9.921.000 | 6.130.000 | 100 | 65,98 |
|  |  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas ke Dalam dan Luar Daerah | Terciptanya Koordinasi dan Konsultasi yang Baik antara Provinsi dengan Kab/Kota dan Pusat | 638.109.639 | 445.040.126 | 100 | 69,74 |
|  |  | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | Terlaksananya Kegiatan Informasi, Dokumentasi dan Publikasi | Tersampaikannya Kegiatan Pemerintah Provinsi kepada Masyarakat | 38.000.000 | 29.913.000 | 100 | 78,72 |
| **2.** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Terlaksananya Pemeliharaan KendaraanDinas/Opersional | Tersedianyan Kendaraan Dinas yang Baik untuk Mendukung Kegiatan | 156.300.000 | 128.278.920 | 100 | 82,07 |
|  |  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi | Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan  Komputerisasi | Tersedianya Sarana yang Baik untuk mendukung Pekerjaan | 6.800.000 | 5.200.000 | 100 | 76,47 |
|  |  | Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset OPD | Tersedianya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang  OPD, serta tunjuk aset yang telah dihibahkan ke Kabupaten/Kota | Terciptanya Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang  OPD dengan Baik dan Tertata | 83.640.202 | 56.489.620 | 100 | 67,54 |
|  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional | Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional Penunjang Aktifitas Perkantoran | 647.160.000 | 549.821.500 | 95 | 84,96 |
|  |  | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terlaksananya Pekerjaan dengan Baik | 647.583.876 | 630.451.000 | 93,5 | 97,35 |
| **3.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Tersedianya Pakaian Dinas Harian Karyawan PNS Dinas  Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Berjalannya Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Organisasi  Perangkat Daerah | 79.315.200 | 60.016.000 | 90 | 75,67 |
| **4.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Peningkatan Pemahaman Peraturan Perundang-undangan | Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur untuk Mendukung Tupoksi | 144.960.000 | 104.338.475 | 100 | 71,98 |
| **5.** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD | Tersusunnya RKA dan DPA SKPD Dinas Perumahan Rakyat,  Kawasan Permukiman dan Pertanahan | Terciptanya Perencanaan dan Penganggaran Dinas Perumahan  Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang Baik | 94.179.950 | 73.193.670 | 100 | 77,72 |
|  |  | Penatausahaan Keuangan SKPD | Terlaksananya Kelancaran Penatausahaan Keuangan OPD | Terciptanya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik | 218.274.550 | 189.750.000 | 100 | 86,93 |
|  |  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja OPD (LAKIP, LKPJ dan  LPPD) | Tersampaikannya Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan  Permukiman dan Pertanahan | 50.000.000 | 24.658.670 | 100 | 49,32 |
|  |  | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD | Terlaksananya Monitoring Evaluasi Kinerja dan Pelaporan  Program Tahunan OPD secara Terpadu | Tercapainya Target Pelaksanaan Program yang Berkualitas | 93.268.800 | 79.035.300 | 10 | 84,74 |
| **6.** | **Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional** | Peningkatan Pembangunan Infrastruktur TPA Regional | Tersedianya Infrastruktur di TPA Sampah Regional | Infrastruktur TPA Sampah Regional | 1.254.423.000 | 1.249.772.000 | 100 | 99,63 |
| **7.** | **Program Pengembangan Perumahan** | Penguatan dan Pembinaan POKJA Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat | Terlaksananya Sosialisasi dan rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat serta terlaksananya pendampingan Bidang Teknis PPSP dan AMPL | Meningkatnya Kapasitas SDM dalam Kelembagaan Pokja untuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman serta Meningkatnya Pelayanan PPSP dan AMPL di Kabupaten/Kota | 343.588.000 | 317.437.034 | 100 | 92,39 |
|  |  | Sosialisasi Percepatan Penyediaan Perumahan Melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | Terlaksananya Sosialisasi Percepatan Penyediaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | Meningkatnya Peran Pengembang dalam Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Kab/Kota | 60.293.700 | 58.839.500 | 60 | 97,59 |
|  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perumahan | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Kepada Aparatur Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota | Meningktanya Pemahaman Aparatur Pemerintah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan Rakyat | 64.971.700 | 52.127.800 | 100 | 80,23 |
|  |  | Sosialisasi Workshop Pembangunan Rumah yang Aman Terhadap Bencana Alam | Terlaksananya Sosialisasi dan Workshop Pembangunan Rumah yang Aman terhadap Bencana Alam kepada Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan | Meningkatnya Pemahaman Pelaku Pembangunan di Bidang Perumahan terhadap Rumah yang Aman Bencana Alam | 165.497.992 | 130.242.000 | 100 | 78,70 |
|  |  | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat | Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Perumahan Rakyat pada 19 Kabupaten/Kota | Monitoring Kualitas Program Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sumatera Barat | 199.435.000 | 181.942.328 | 100 | 91,18 |
|  |  | Penyusunan SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sumatera Barat | Tersusunnya Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumatera Barat | Terlaksananya Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan di Provinsi Sumatera Barat | 640.862.000 | 634.843.928 | 100 | 95,79 |
|  |  | Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat | Terlaksananya Updating Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat | Terupdatenya Data Rumah Tidak Layak Huni di Provinsi Sumatera Barat |  |  | 100 | 99,06 |
| **8.** | **Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan** | Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Kumuh, Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) | Terlaksananya Perencanaan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) | Tersedianya Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh pada Kawasan Sasaran | 568.462.030 | 555.748.059 | 100 | 97,76 |
|  |  | Pembangunan PLP2K-BK dan Supervisi | Terlaksananya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) | Terwujudnya Pembangunan Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis Kawasan (PLP2K-BK) | 1.817.697.594 | 148.408.9759,5 | 100 | 81,65 |
|  |  | Pembangunan PSU Kawasan Strategis dan Khusus (Rawan Bencana, Agropolitan, Minapolitan, Desa Tertinggal) | Terlaksananya Pembangunan Kawasan Strategis dan Khusus | Tersedianya PSU di Kawasan Strategis dan Khusus | 1.457.015.505 | 83.643.100 | 95,15 | 5,74 |
|  |  | Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas Umum Kawasan Strategis dan Khusus | Terlaksananya Perencanaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Kawasan Strategisdan Khusus | Tersedianya Perencanaan Penanganan Kawasan Kumuh Pada Kawasan Sasaran | 480.038.430 | 478.451.818 | 100 | 99,67 |
|  |  | Penyusunan Ranperda Persampahan Provinsi Sumatera Barat | Dokumen Draft Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Persampahan | Draft Ranperda Sumatera Barat | 131.063.000 | 108.248.504 | 100 | 82,59 |
|  |  | Sosialisasi Persampahan Terhadap Kab/Kota | Jumlah Kab/Kota yang telah diberikan sosialisasi persampahan | Terlaksananya Sosialisasi di Daerah | 102.045.100 | 64.248.700 | 100 | 62,96 |
| **9.** | **Program Pengelolaan Pertanahan** | Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah | Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah | Meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah dalam Penyusunan Perencanaan Penggunaan Tanah | 83.000.000 | 62.612.800 | 100 | 75,44 |
|  |  | Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat | Meningkatnya PemahamanAparatur Pemerintah dalam Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee kepada Aparatur Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota di Sumatera Barat | 79.000.000 | 73.272.513 | 100 | 92,75 |
|  |  | Bimtek Pengelolaan Pertanahan | Terlaksananya Bimtek Pengelolaan Pertanahan | Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah dalam  Pengelolaan Pertanahan | 103.000.000 | 50.441.300 | 100 | 48,97 |
|  |  | Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan Pertanahan | Terlaksananya Sosialisasi dan Koordinasi dalam  PelaksanaanInventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan  Pertanahan | Meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah dalam  Pelaksanaan Inventarisasi dan Penanganan Masalah Pengelolaan  Pertanahan | 235.000.000 | 152.284.600 | 100 | 64,80 |
|  |  | Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Pengadaan Tanah | 269.000.000 | 256.517.465 | 100 | 95,36 |
|  |  | Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Sumatera Barat | Terlaksananya Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik  Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat | Terwujudnya Penanganan Masalah Sengketa dan Konflik  Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat | 141.000.000 | 109.363.254 | 100 | 77,56 |
|  |  | Pembinaan dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi | Terlaksananya Sosialisasi dan Monitoring Pemberian Izin Lokasi | Meningkatnya Pemahaman Aparatur Pemerintah dalam  Pemberian Izin Lokasi | 73.000.000 | 58.773.676 | 100 | 80,51 |
|  | TOTAL |  |  |  | 11.614.680.414,00 | 8.944.862.591,50 | 99,91 | 77,01 |

1. **OUTCOME**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Program** | **Outcome** |
| **1** | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran |
| **2** | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur |
| **3** | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Meningkatnya Disiplin Aparatur dalam Berpakaian Dinas |
| **4** | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur |
| **5** | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Peningkatan kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit  kinerja SKPD, peningkatan nilai LAKIP SKPD, peningkatan akurasi,  kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan keuangan, persentase kesesuaian usulan Renja dengan Renstra, persentase kesesuaian usulan Renja dengan RPJMD |
| **6** | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur TPA Sampah Regional |
| **7** | Program Pengembangan Perumahan | Peningkatan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| **8** | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | Meningkatnya Pemberdayaan Komunitas Perumahan |
| **9** | Program Pengelolaan Pertanahan | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan di Sumatera Barat |

1. **PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Program** | **Permasalahan** | **Solusi** |
| **1** | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran |  |  |
| **2** | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |  |  |
| **3** | Program Peningkatan Disiplin Aparatur |  |  |
| **4** | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur |  |  |
| **5** | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Perlu sinkronisasi antara RPJMD Provinsi dengan Renstra OPD karena adanya ketidaksesuaian sasaran strategis dan indicator kinerja terkait terbentuknya OPD baru  Target pendanaan perlu disesuaikan agar kinerja yang berkaitan dengan penanganan urusan wajib dapat dicapai | Ditingkatkan sinkronisasi antara RPJMD Provinsi dengan Renstra OPD  Perencanaan target pendanaan yang lebih baik |
| **6** | Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional | Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan  Belum lengkapnya data kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi (10-15) Hektar  Belum lengkapnya data PSU (prasarana, sarana, umum) kawasan permukiman lintas Kabupaten / Kota | Melengkapi NSPK dalam pelaksanaan kegiatan  Melengkapi data kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi  Melengkapi data PSU kawasan permukiman lintas Kabupaten / Kota |
| **7** | Program Pengembangan Perumahan | Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan | Melengkapi NSPK dalam pelaksanaan kegiatan |
| **8** | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan | Melengkapi NSPK dalam pelaksanaan kegiatan |
| **9** | Program Pengelolaan Pertanahan | Belum lengkapnya NSPK dalam pelaksanaan kegiatan sehingga menjadi kendala untuk melakukan kegiatan | Melengkapi NSPK dalam pelaksanaan kegiatan |

**BAB II. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI**

1. **TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA**
2. **Dasar Hukum**
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 551/KPTS/M/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Gubernur Melalui Kegiatan Dekonsentrasi Subbidang Pembiayaan Perumahan Tahun 2018.
5. **Instansi Pemberi Tugas Pembantuan**

Pemberi tugas pembantuan adalah Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

1. **Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan**
2. Satuan kerja yang melaksanakan adalah Satuan Kerja Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat;
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat.
4. **Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya**
5. Program Pembiayaan Perumahan
6. Kegiatan Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahanrja yang melaksanakan adalah Satuan Kerja Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan
7. **Sumber Dan Jumlah Anggaran**
8. Sumber dana berasal dari Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Dekonsentrasi Sub Bidang Pembiayaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 No. DP DIPA-033.08.3.413203/2018 tanggal 03 September 2018;
9. Jumlah Anggaran dan Realisasi

**Pagu Dana**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kode** | **Program/Kegiatan/Output** | **Pagu (Rp Ribu)** |
|
| 1 | 12 | Program Pembiayaan Perumahan | 1.092.108 |
| 1 | 5319 | Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan | 1.092.108 |
| 1 | 002 | Layanan Pembinaan dan Bantuan Teknis pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Pemerintah dan Pemerintah Daerah | 833.586 |
| 2 | 994 | Layanan Perkantoran | 258.522 |
| **TOTAL** | | | **1.092.108** |

**Realisasi**



1. **Permasalahan dan Solusi**

Permasalahan yang terkait pelaksanaan kegiatan tidak ada